

## ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PPh 21 DAN EKONOMI

Ramli

**Abstract:** One of the government revenue sources for development comes from taxes. The tax separation should be fair for each tax payer because every tax payer has a different income, more over the income that is received can not fulfil their daily needs. The price increases over and over, but in the other hand the income is getting hard to increase. That is why, it is needed to study the analyzes of the PTKP change to the decreasing of PPh 21.

The research depent on 200 people as samples and the employer of KIM industry areas and STAR in Medan. By using the quantitative analyzes, we can conclude the research that: first, the potency of tax payer dan the potency of income has decreased because of the PTKP change. Second, disposable income increased because of the PTKP change. Third, MPC decreased (0,0003) because of the PTKP change. Forth, MPT decreased (0,0076) because of the PTKP change.

**Keywords:** PTKP, tax payer, income, MPC, MPT

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan biaya pelaksanaan pembangunan yang dapat diandalkan adalah dari penerimaan pajak.

Dalam tahun tertentu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan ditentukan oleh *coverage ratio* dan potensi penerimaan. Dengan kata lain, PTKP mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu, naiknya PTKP berpengaruh negatif pada potensi penerimaan PPh perseorangan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak. Di lain pihak terjadi kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat akibat perubahan pendapatan tidak kena pajak. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung atau pajak pertambahan nilai.

Keberadaan PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. Keputusan untuk merubah PTKP yang ideal berapa besar, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak PPh 21.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan kepada perubahan PTKP yang dikemas dengan judul “Analisis perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21”.

Beranjak dari latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besar perubahan sumber penerimaan pajak akibat penyesuaian PTKP?
2. Berapa besar ‘*potensial loss*’ penerimaan PPh 21 akibat penyesuaian PTKP?
3. Berapa besar sensitivitas penyesuaian PTKP terhadap kondisi ekonomi?

Tujuan diadakannya studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya perubahan penerimaan pajak tidak langsung akibat penyesuaian PTKP.
2. Untuk mengetahui besarnya ‘*potensial loss*’ terhadap penerimaan PPh akibat dari berbagai alternatif kenaikan PTKP.
3. Untuk mengetahui besarnya sensitivitas perubahan PKTP terhadap kondisi ekonomi.

### Penerimaan Pemerintah

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dilaksanakan kepada subyek pajak di mana tidak ada balas

jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan retribusi adalah pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah (Mangkoesebroto G:1991:151).

Penerimaan dari sumber pajak sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Sebagaimana dikemukakan Hardiyanto dkk (2002 L 71 – 72). Faktor eksternal terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah nasional, tingkat suku bunga, sedangkan faktor internal meliputi variabel dasar pengenaan pajak (*taxe base*) atau obyek pajak dan tarif pajak.

### Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pasal 7 UU No. 77/2000, seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak yang jumlahnya diperlihatkan pada Tabel 1.

### Tarif Pajak

Pembebanan tarif pajak kepada wajib pajak ada tiga jenis yaitu:

1. Lumpsum
2. Advalorem
3. Spesifik

#### ➤ Tarif Pajak Lumpsum

Tarif pajak lumpsum yaitu sistem pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara perorangan. Misalnya tarif beban pajak untuk setiap kepala rumah tangga dikenakan Rp. 500 ribu per tahun

#### ➤ Tarif Advalorem

Tarif pajak advalorem yaitu sistem yang dikenakan kepada wajib pajak didasarkan

suatu persentase tertentu, misalnya 5%, 10%, 20% dan sebagainya. Sistem pajak advalorem dapat dibagi tiga: 1) Sistem regresif yaitu bila jumlah pajak yang dibayar terhadap penghasilan wajib pajak adalah menurun, maka penghasilan wajib pajak naik; 2) Sistem proporsional yaitu rasio jumlah pajak yang dibayar terhadap penghasilan wajib pajak adalah tetap; dan 3) Sistem progresif yaitu bila rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap penghasilan wajib pajak adalah meningkat sejalan dengan naiknya penghasilan wajib pajak.

#### ➤ Tarif Pajak spesifik

Tarif pajak spesifik adalah sistem tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sebesar jumlah tertentu per satuan unit obyek pajak. Misalnya Rp 25 per kilogram, per unit, per batang dan sebagainya. Sistem pajak ini biasanya diberlakukan untuk pajak tidak langsung seperti cukai, pajak penjualan.

### Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak atas wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Tarif 5 % ditetapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000
2. Tarif 10 % ditetapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 50.000.000
3. Tarif 15 % ditetapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 75.000.000
4. Tarif 25 % ditetapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 100.000.000
5. Tarif 35 % ditetapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 200.000.000

Tabel 1. Besar PTKP per Tahun dan per Bulan

Keterangan	Setahun	Sebulan
1. Untuk diri pegawai (K)	Rp 2.550.000	Rp 2.400.000
2. Tambahan untuk pegawai yang kawin (KO)	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000
3. Tambahan untu anak pertama (K1) atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000
4. Tambahan untuk anak kedua (K2) atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000
5. Tambahan untuk anak ketiga (K3) atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini di Kota Medan dengan memfokuskan pada Kawasan Industri Medan (KIM) dan pada Kawasan Industri PT. STAR Tanjung Morawa.

Sampel *size* untuk data primer karyawan ditentukan secara quota sebesar 100 orang untuk Kawasan Industri Medan dan 100 orang untuk PT. Kawasan Industri STAR Tanjung Morawa Medan. Penentuan sampel pada studi kasus pekerja yang berada pada Kawasan Industri Medan dan PT Kawasan Industri STAR Tanjung Morawa Medan ditentukan dengan teknik *purposive*.

Pengumpulan data primer diperoleh langsung dari responden dengan teknik wawancara. Pedoman wawancara disiapkan (kuesioner) untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh langsung dari publikasi resmi seperti BPS, instansi pemerintah dalam bentuk laporan, buku, jurnal, dan majalah.

Penjelasan analisa data sebagai berikut:

- 1) Dihitung jumlah wajib pajak yang tidak kena pajak (PTKP) dari sampel atau dilakukan inventarisasi bagi wajib pajak dan wajib pajak yang tidak kena PTKP.
- 2) a. Besarnya *potensial loss* (PL) sebelum perubahan PTKP  
 $PL - a_1 - b_1 = PL_0$   
 b. Besar *potensial loss* (PL) setelah perubahan PTKP adalah  
 $PL = a_2 - b_2 = PL_1$   
 c. Besar *potensial loss* (PL) penerimaan PPh  
 $PL \text{ Penerimaan PPh} = PL_0 - PL_1$
- 3) Untuk mengetahui besarnya perubahan penerimaan pajak tidak langsung akibat perubahan PTKP.

- (1) Menentukan besar *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dengan model

$$C = a + bT_d \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_d = Y - T_x \dots\dots\dots (2)$$

$$T_x = T_o - hY \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:  
 C = Tingkat Konsumsi  
 Yd = *Disposable income*  
 Y = Pendapatan  
 Tx = Pajak

To = Beban Pajak  
 a = Konstanta  
 b = MPC  
 h = Koefisien Pajak  
 a<sub>1</sub> = Potensi sebelum perubahan PTKP  
 b<sub>1</sub> = Tidak potensi sebelum perubahan PTKP  
 a<sub>2</sub> = Potensi setelah perubahan PTKP  
 b<sub>2</sub> = Tidak potensi setelah perubahan PTKP

- (2) Menentukan tingkat konsumsi akibat perubahan PTKP

Akibat adanya penyesuaian PTKP akan berakibat pada berubahnya pendapatan yang siap dibelanjakan sebesar perubahan kenaikan PTKP tersebut, sehingga mengakibatkan konsumsi akan berubah sebesar:

$$C = b \cdot \Delta \text{PTKP} \dots\dots\dots (4)$$

Dengan perubahan tingkat konsumsi akan berdampak pada kondisi ekonomi terutama pada tingkat pendapatan agregat.

**PEMBAHASAN**

**Tingkat Pendapatan**

Besarnya imbalan kontribusi kewajiban melaksanakan pekerjaan pada bidang tertentu sangat ditentukan oleh peraturan pemerintah dan perusahaan yang telah ditetapkan. Biasanya tingkat pendapatan pada dasarnya ditentukan oleh: lama bekerja, jabatan, dan tingkat pendidikan. Biasanya tingkat pendapatan seseorang sebagai dasar untuk pembebanan pajak pasal 21 dan 26, dan mungkin bisa saja terjadi pendapatan yang diperoleh seseorang tidak menimbulkan kewajiban.

Tingkat pendapatan responden per tahun yang terendah berkisar Rp 3.250.000,- dan pendapatan yang tertinggi berkisar Rp 97.500.000,- Tingkat pendapatan responden dikelompokkan dalam 11 kelas dengan ukuran tertentu menunjukkan antara 0 – 5 juta sebesar 2,5 %, antara 5 > - 10 juta sebesar 34,5 %, antara 10 > - 15 juta sebesar 34 %, antara 15 > - 20 juta sebesar 12,5 %, antara 20 > - 30 juta sebesar 3 %, antara 30 > - 40 juta sebesar 2,5 %, antara 40 > - 45 juta sebesar 1,5 %, antara 45 > - 50 juta sebesar 0,5 % dan lebih

dari 50 juta sebesar 0,5 % dan lebih dari 50 juta sebesar 4 %.

Tabel 2. Distribusi Responden dan Atas Tingkat Pendapatan

Kelas Tingkat Pendapatan	Frekuensi	%
0 – 5 juta	5	2,5
5 > - 10 juta	69	34,5
10 > - 15 Juta	68	34,0
15 > - 20 juta	25	12,5
20 > - 25 juta	9	4,5
25 > - 30 juta	6	3,0
30 > - 35 juta	5	2,5
35 > - 40 juta	1	0,5
40 > - 45 juta	3	1,5
45 > - 50 juta	1	0,5
> 50 juta	8	4,0
Jumlah	200	100

Tabel 3. Distribusi Responden Atas Pengeluaran Rumah Tangga

Kelas Pengeluaran (Rp)	Frekuensi	%
0 – 5 juta	45	23
2 > - 10 juta	99	49,5
10 > - 15 juta	29	14,5
15 > - 20 juta	14	7
20 > - 25 juta	5	2,5
25 > juta	7	
Jumlah	200	100

Tabel 4. Persentase Perubahan Sumber Penerimaan Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP

Sumber Penerimaan	Potensi Wajib Pajak				Total WP
	WP Potensi		WP Tidak Potensi		
	Kuantitas	Persen	Kuantitas	Persen	
Sebelum Perubahan PTKP	200	100	0	0	200
Sesudah Perubahan PTKP	137	68,5	63	31,50	200
Perubahan potensi wajib Pajak				31,50	

Tabel 5. *Potential Loss* Penerimaan Pemerintah yang Diterima Akibat Perubahan PTKP

Pendapatan yang Diterima	Objek Pajak	Pendapatan yang Diterima
Sebelum Perubahan PTKP	200	122.206.818
Sesudah Perubahan PTKP	137	75.292.952
<i>Potential Loss</i>		46.913.866
<i>% Potential Loss</i>		38,39 %

Tabel 6. Disposable Income Akibat Perubahan PTKP

Pendapatan yang Diterima	Objek Pajak	Pendapatan yang Diterima
Sebelum Perubahan PTKP	200	2.886.734.133
Sesudah Perubahan PTKP	137	2.962.593.099
<i>Potential Los</i>	63	75.858.966
<i>% Potential Loss</i>	31,50 %	2,63 %

Tabel 7. Hasil Koefisien Pendapatan terhadap Konsumsi Diolah dengan Eview 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1119688	578903.7	1.934153	0.0545
X1	0.598273	0.030446	1965043	0.0000
<i>R-squared</i>	0.661040	<i>Mean dependent var</i>		9754958
<i>Adjusted R-squared</i>	0.659328	<i>S.D. dependent var</i>		9131008.
<i>S.E. of regression</i>	5329507	<i>Akaike info criterion</i>		33.82537
<i>Sum squared resid</i>	5.62E+15	<i>Schwarz criterion</i>		33.85835
<i>Log likelihood</i>	-3380.537	<i>F-statistic</i>		286.1395
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.881710	<i>Prob. (F-statistic)</i>		0.000000

Tabel 8. Hasil Koefisien Pendapatan terhadap Pembayar Pajak, Diolah dengan EVIEW 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-549559,4	38919.44	-14.12043	0.0000
X1	0.080409	0.002047	39.28403	0.0000
<i>R-squared</i>	0.886288	<i>Mean dependent var</i>		611034.1
<i>Adjusted R-squared</i>	0.885713	<i>S.D. dependent var</i>		1059862.
<i>S.E. of regression</i>	358300.4	<i>Akaike info criterion</i>		28.42608
<i>Sum squared resid</i>	2.54E+13	<i>Schwarz criterion</i>		28.45906
<i>Log likelihood</i>	-2840.608	<i>F-statistic</i>		1543.235
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.174064	<i>Prob. (F-statistic)</i>		0.000000

Tabel 9. Hasil Koefisien Pendapatan terhadap Konsumsi, Diolah dengan Program EVIEW 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	869122.0	587288.4	1.479890	0.1405
X1	0.598309	0.030288	19.75426	0.0000
<i>R-squared</i>	0.666798	<i>Mean dependent var</i>		9730264.
<i>Adjusted R-squared</i>	0.665089	<i>S.D. dependent var</i>		9193647.
<i>S.E. of regression</i>	5320499	<i>Akaike info criterion</i>		33.82213
<i>Sum squared resid</i>	5.52E+15	<i>Schwarz criterion</i>		33.85546
<i>Log likelihood</i>	-3329.480	<i>F-statistic</i>		390.2307
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.883027	<i>Prob. (F-statistic)</i>		0.000000

Tabel 10. Hasil Koefisien Pendapatan terhadap Pembayaran Pajak Diolah dengan Program EVIEW 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-698754.0	49484.62	-14.12063	0.0000
X1	0.072897	0.002552	28.56438	0.0000
<i>R-squared</i>	0.807107	<i>Mean dependent var</i>		380869.9
<i>Adjusted R-squared</i>	0.806118	<i>S.D. dependent var</i>		1018128.
<i>S.E. of regression</i>	448302.4	<i>Akaike info criterion</i>		28.87442
<i>Sum squared resid</i>	3.92E+13	<i>Schwarz criterion</i>		28.90776
<i>Log likelihood</i>	-2842.131	<i>F-statistic</i>		815.9240
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.831496	<i>Prob. (F-statistic)</i>		0.000000

Tabel 11. Pendapatan Tidak Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP dari Rp 2.880.000 ke Rp 6.444.000

PTKP	Nilai PTKP (Rp)
Dasar Rp. 2.880.000	2.058.870.367
Dasar Rp. 6.444.000	1.107.159.037
Perubahan	951.711.330
Persentase perubahan	46,22

### 1. Total Pengeluaran

Pendapatan yang diperoleh responden dialokasikan untuk berbagai kebutuhan hidup pangan dan sandang, perumahan, pendidikan, sarana tranfortasi, dan keperluan sosial. Pendapatan yang diterima dengan pengetahuan tidak selalu seimbang akan tetapi bisa terjadi kekurangan atau kelebihan. Besar kecilnya pengeluaran sangat ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga, biaya hidup pendidikan anak, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran responden yang paling rendah sebesar Rp 1.220.000,- per tahun dan pengeluaran yang tertinggi sebesar Rp 75.200.000,- per tahun. Klasifikasi pengeluaran yang dilakukan dengan interval tertentu menunjukkan tingkat pengeluaran sampai dengan 5 juta sebesar 23 % antara 5 > - 10 juta sebesar 49 % antara 10 > - 15 juta sebesar 15 %, antara 15 > - 20 juta sebesar 7 %, antara 20 > - 25 juta sebesar 2,5 % dan lebih besar dari 25 juta sebesar 3 %.

### 2. Perubahan Pendapatan Akibat PTKP

Data primer dikaji dari sampel yang diperoleh menunjukkan sumber pendapatan akibat perubahan PTKP adalah sebesar 31,5 %.

### 3. Nilai *Potential Loss* Penerimaan dari Pajak Akibat Perubahan PTKP

Besarnya *potential loss* akibat perubahan pendapatan tidak kena pajak dari sisi nilai pendapatannya yang diterima (berdasarkan data sampel yang diolah) menunjukkan sebesar Rp 46.913.866.

Berdasarkan persentase *potential loss* pendapatan hasil analisis data sampel, dapat memperkirakan "*potential loss*" pendapatan dari pajak PPh 21 yang diterima pemerintah sebesar 38.34 %.

### 4. *Disposable*

Besarnya perubahan *disposable income* akibat perubahan pendapatan tidak kena pajak

berdasarkan sampel meningkat sebesar Rp 75.858.966 atau sebesar Rp.2,63 %.

### 5. Kecenderungan Konsumsi dan Pajak Sebelum Perubahan PTKP

Pendapatan yang diterima seseorang akan dibelanjakan untuk kebutuhan hidup (pengeluaran/konsumsi). Besarnya perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap perubahan konsumsi (MPC: *Marginal Propertly to Consumption*). Berdasarkan data sampel yang diolah menunjukkan fungsi konsumsi =  $Y = 1119688 + 0,5983 X1$ . Yang berarti MPC nya adalah 0,5983, artinya apabila pendapatan naik sebesar Rp 1000 ceteris paribus, maka akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp 598,30,-

Tingkat pendapatan penduduk yang melebihi batas tertentu diwajibkan untuk membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah, kenaikan pendapatan cenderung kewajiban membayar pajak juga meningkat. Atau disebut dengan *Marginal Propensly to Taxe* (MPT). Berdasarkan data sampel yang telah diolah menunjukkan fungsi pajak  $Y = - 549559,4 + 0,0804 X1$ , yang berarti MPT nya lah 0,0804. Artinya apabila pendapatan meningkat sebesar Rp 1000, ceteris paribus, maka akan meningkatkan pembayar pajak sebesar 80,4.

### 6. Kecenderungan Konsumsi dan Pajak Setelah Perubahan PTKP

Kecenderungan konsumsi dari sampel yang diamati setelah ada perubahan PTKP secara relatif mengalami perubahan relatif yang kecil sebesar 0,0003 yaitu membandingkan MPC sebelum perubahan PTKP dan sesudah perubahan PTKP, besar MPC setelah perubahan PTKP dapat dilihat pada Tabel 9.

MPC setelah perubahan PTKP sebesar 0,5980. Artinya apabila tingkat pendapatan meningkat sebesar Rp 1000, ceteris paribus akan meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar Rp 596,- Perubahan MPT akibat

perubahan PTKP menunjukkan sebesar 0,0728. Artinya apabila pendapatan meningkat sebesar Rp 1000, ceteris paribus akan meningkatkan pengeluaran pajak sebesar Rp 72,80,-

Besar MPT akibat perubahan PTKP dengan MPT setelah perubahan PTKP relatif kecil sebesar 0,096. Perubahan ini cenderung menurun akibat perubahan PTKP.

## 7. Penurunan Pajak Tidak Langsung Akibat Perubahan PTKP

Perubahan PTKP yang sebahagian penduduk meningkat *Disposable Income*-nya, yang menjadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (konsumsi). Tindakan konsumsi masyarakat menjadi sumber penerimaan pemerintah dari pajak tidak langsung (seperti PPn, cukai, dan bea masuk). Besarnya konsumsi sangat ditentukan oleh keadaan MPC dikalikan dengan besarnya perubahan pendapatan yang tidak kena pajak (konsumsi = MPC.  $\Delta$  PTKP).

Besarnya tingkat konsumsi dari sampel yang diamati setelah perubahan PTKP adalah sebesar Rp 569.123.375,30 (Rp 951.711.330 x 0,5980). Jika pajak tidak langsung rata-rata dibebankan tarif pajak 10 %, maka tingkat penerimaan pajak tidak langsung adalah sebesar Rp 56.912.337,57.-

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan besarnya sampel yang dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase potensi wajib pajak akibat perubahan PTKP sebesar 68,56 % dan tidak potensi sebesar 31,50 %.
2. Besar *potential loss* pendapatan yang diterima akibat perubahan PTKP sebesar 38,39 %.

3. *Disposable Income* yang diterima sampel akibat perubahan PTKP cenderung naik sebesar 2,63 %.
4. Fungsi konsumsi sebelum perubahan PTKP  $Y = 1119688 + 0,5983 X_1$ , dan sesudah perubahan PTKP  $Y = 896174,80 + 0,5980 X_1$ .
5. Fungsi pajak sebelum perubahan PTKP  $Y = -549559,40 + 0,0804 X_1$ , dan sesudah perubahan PTKP  $Y = -701297,60 + 0,0728 X_1$ .
6. Perubahan pendapatan tidak kena pajak akibat perubahan PTKP sebesar 46,22 %.
7. Penerimaan pajak tidak langsung dari sampel yang diamati sebesar Rp. 56.912.337,53.

### 2. Saran

Berdasarkan uraian analisis dan kesimpulan, disarankan:

1. Kepada dirjen. pajak
  - Dasar pertimbangan pendapatan tidak kena pajak ekuivalen dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah.
  - Tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perubahan PTKP yang dinamis setiap tahun.
2. Kepada masyarakat  
Kepada masyarakat disarankan untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban pajak dengan benar dan patuh membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kepada pelayanan pajak  
Kepada pelayanan pajak di instansi terkait, kiranya dapat meningkatkan pelayanan pajak sehubungan dengan informasi dan pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1985. *Perpajakan*. Jakarta, Bumi aksara.
- Atkinson dan Stiglitz (1997), *Lectures on Public Economics*, Winthrop Publishing Inc, Massachusetts.
- Chelliah, Raja J. dan Narain, Sinha (1998), *State Finance in India; Vol 3; The Measurement of Tax Effort by State Government No. 523*, Woshington. P.7
- Chodry, N.N. (1975), *A. Study of the Elasticity of the West Malaysian Income Tax system 1961-1970*, IMF Staff Paper, 22; p.494-500
- Gujarati N. Damodar, (188), *Basic Econometrics*, Second Edition, Mc Graw Hill Company, New York.
- Hasibuan, Nurimansyah, (1993), *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi, Teori dan Kebijaksanaan*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hirawan, Susujati, B., (1986), *Analisa tentang Keuangan Daerah Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, No. 1
- Kartasapoetra, G.E. Komaruddin dan Rience G. Kartasapoetra, 91989), *Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya*, Biro Aksara, Jakarta.
- Kristiadi, JB., (1985), *Masalah Sekitar Pendapatan Asli Daerah*, Prisma, LP3ES, No. 12, tahun 1985 Hal. 35-43.
- Kuncoro, Mudrajad, (1985), *Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema otonomi dan Ketergantungan*, Prisma, LP3ES, No. 12, Hal.3-17
- Pontjowinoto, P. dan Manurung, M.P., (1991), *Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Derah*, Prisma, LP3ES, No. 8, Hal. 31-42
- Suparmoko, M., (1997), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi IV, BPEF – UGM, Yogyakarta.
- Sutrisno, D.H., (1981), *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Cetakan ketiga, BPFE – UGM, Yogyakarta.